

Halal Friendly Tourism Policy In Banyuwangi

Nur Anim Jauhariyah

IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

animjauhariyah@gmail.com

Abstract: *This study discusses halal tourism which is one of the policies of the Banyuwangi Regency Government in the effort of developing tourism to increase tourist visits in Banyuwangi Regency. The objectives in this study are 1) Knowing the percentage of tourist visits in Banyuwangi Regency; 2) Knowing the strategies of the local government in developing halal friendly tourism in Banyuwangi. This research uses a quantitative approach with secondary data support. The results showed that 1) The number of tourists both archipelago and foreign tourists in Banyuwangi Regency has increased every year. The highest growth of tourist arrivals from the archipelago was in 2016 at 52.11% and the lowest in 2018 was 2.16%, while the highest foreign tourist arrivals were in 2016 at 40.09% and the lowest in 2018 at 0.23%; 2) The policy strategy in developing halal tourism in Banyuwangi Regency is based on market segments not only limiting visitors who specialize in women's areas but rather emphasizing the need for innovations that can hit market segments. So that visitor interest in the concept offered can increase the number of tourists coming to tourist destinations in Banyuwangi.*

Keywords: *Halal Tourism, Number of visits, Banyuwangi*

PENDAHULUAN

Kabupaten Banyuwangi secara geografis terletak diujung timur Pulau Jawa. Wilayah Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah pegunungan, merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkembangan. Daratan yang datar dengan berbagai produksi tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah Utara ke Selatan yang merupakan daerah penghasil biota laut. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak diantara 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur. Secara administratif sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso (Badan Pusat Statistik, 2018).

Selain pertanian, Banyuwangi juga memiliki potensi wisata dan kelautan. Potensi kelautan Banyuwangi selain telah menghantarkan kabupaten ini sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia juga masih memiliki peluang yang teramat besar untuk dioptimalkan. Karena itu tak heran jika Kabupaten ini tidak saja dikelilingi oleh tiga Taman Nasional dan tiga Kesatuan Pemangkuan Hutan, tetapi juga dikelilingi oleh kampung-kampung nelayan seperti Muncar, Rajegwesi, Pancer, Grajagan, Blimbingsari, Pulau Santen, Mandar, Bangsring dan masih banyak lagi kampung



nelayan di Banyuwangi yang memiliki potensi kelautan yang bisa dioptimalkan dan layak bersaing. Potensi perikanan laut Banyuwangi juga tak jenuh, dalam artian masih memiliki peluang yang teramat besar untuk dioptimalkan.

Potensi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi pertama kali mendunia pada saat mengikuti penghargaan dari Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO) dalam ajang "12th UNWTO Awards Forum" di Madrid, Spanyol pada Januari 2016 yang lalu. Kabupaten Banyuwangi yang biasa disebut sebagai "The Sunrise of Java" mendapat penghargaan pada "UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism" untuk kategori "Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola", mengalahkan nominasi lainnya dari Kolombia, Kenya, dan Puerto Rico. (Kompas.com, 2016)

Inovasi pengembangan pariwisata Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2018 juga mendapatkan penghargaan ASEAN Tourism Standard Award dengan 108 kriteria penilaian, dengan skor 87,04% pariwisata di Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi skor tersebut yang tidak hanya pada kebersihan namun semua kriteria yang mendukung situasi nyaman bagi wisatawan yang berkunjung di objek destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi. (Kompas.com, 2018)

Inovasi-inovasi dalam pariwisata terus digulirkan supaya dapat menarik segmen pasar. Seperti halnya pada konsep wisata halal juga dikembangkan di Kabupaten Banyuwangi dengan konsep wisata yang berbeda dengan destinasi wisata yang lainnya. Wisata halal di Banyuwangi telah diterapkan selama dua tahun yang bertempat di wisata syariah pulau santen di Banyuwangi kota. Pengembangan wisata halal tujuannya menangkap segmentasi pasar yang diperuntukkan kepada kalangan perempuan. Pantai Pulau Santen ini memiliki panjang pantai 750 meter (3/4 km). Sedangkan secara keseluruhan panjang garis pantai di Banyuwangi mencapai 177 km. Keberadaan *halal friendly tourism* ini merupakan langkah pemerintah untuk menangkap peluang (Ardian Fanani. 2019)

Keberadaan *halal friendly tourism* merupakan salah satu inovasi dalam upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Banyuwagi. dalam hal ini kita dapat mengetahui 1) Prosentase kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyuwangi, dan 2) Strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan *halal friendly tourism* di Banyuwangi.

Kebijakan Public

Nasucha dalam Pasolong (2010:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. Selanjutnya menurut Amara dalam Islamy (1997:17) bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu kebijakan memuat 3 elemen yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;



3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Thomas Dye dalam Subarsono (2010:2) mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai: “is whatever government choose to do or no to do”, artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan yang objektif dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh 15 pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Edward dan sharkansky dalam Wahab (2008:51-52) mengartikan kebijakan publik yang hampir mirip dengan definisi Dye tersebut di atas yaitu sebagai berikut : kebijakan publik : “is whatever governments say and do, or do not do. It is the goals or purposes of governments programs” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Kemudian mereka mengatakan bahwa kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Menurut Bridgman dan Glyn Davis dalam Nawawi (2009:8-9) adalah banyaknya definisi kebijakan publik menjadikan kita sulit untuk menentukan secara tepat sebuah definisi kebijakan publik. Oleh karenanya, untuk memudahkan pemahaman kita terhadap kebijakan publik, kita dapat meninjaunya dari 5 karakteristik kebijakan publik yaitu: 1. Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami 2. Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya 3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu 4. Pada hakikatnya adalah politis 5. Bersifat dinamis.

Kebijakan Pariwisata

Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Edgell, dkk (2008) yang mengemukakan bahwa kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan berikut ini. Definisi terakhir menjadikan pemasaran, pengembangan produk, dan pelayanan hospitality memegang peranan penting dalam kebijakan kepariwisataan. Lebih penting lagi, definisi tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan kepariwisataan bersifat dinamis dan fleksible dalam melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap perkembangan yang terjadi.

Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali konflik kepentingan di tingkat para pengambil keputusan pada saat mengimplementasikan kebijakan maupun perencanaan kepariwisataan yang



sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga perkembangan pariwisata tidak lagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan yang sudah dibuat.

Telaah terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana Misi yang diemban Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu :

1. Melestarikan nilai keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
2. Mengembangkan jadi industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggungjawab (responsible marketing).
3. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata;
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsive, transparan dan akuntabel.

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Banyuwangi

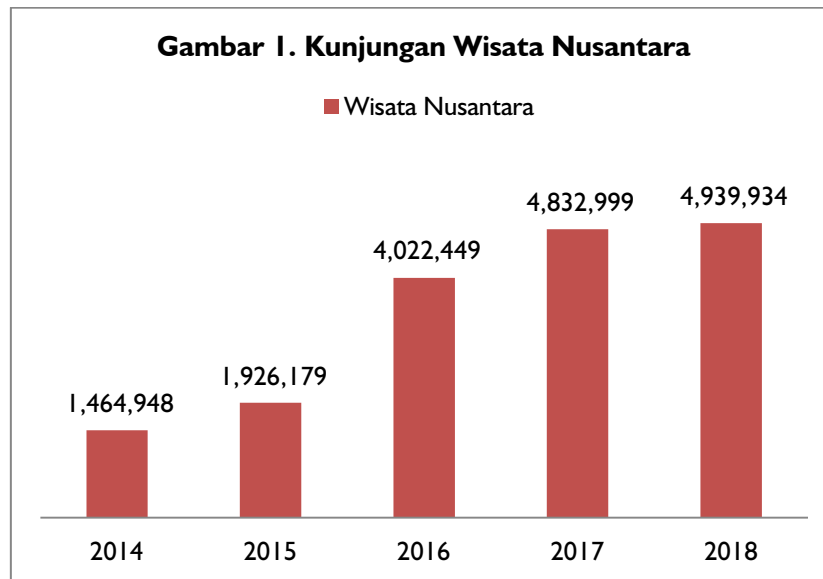
Dinas Pariwisata Banyuwangi mencatat angka kunjungan wisatawan nasional dan turis mancanegara di destinasi wisata Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data statistik kenaikan Pada Tahun 2014 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung di obyek wisata Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.464.948 jiwa dan pada Tahun 2018 sebanyak 4.939.934 jiwa, jika diprosentase peningkatannya sebanyak 337,2%. Sedangkan wisatawan mancanegara pada Tahun 2014 sebanyak 30.681 jiwa meningkat menjadi 99.198 pada Tahun 2018 atau kenaikan sebanyak 323,3%.

Tabel . Jumlah Pengunjung Wisata di Obyek Wisata di Kabupaten Banyuwangi

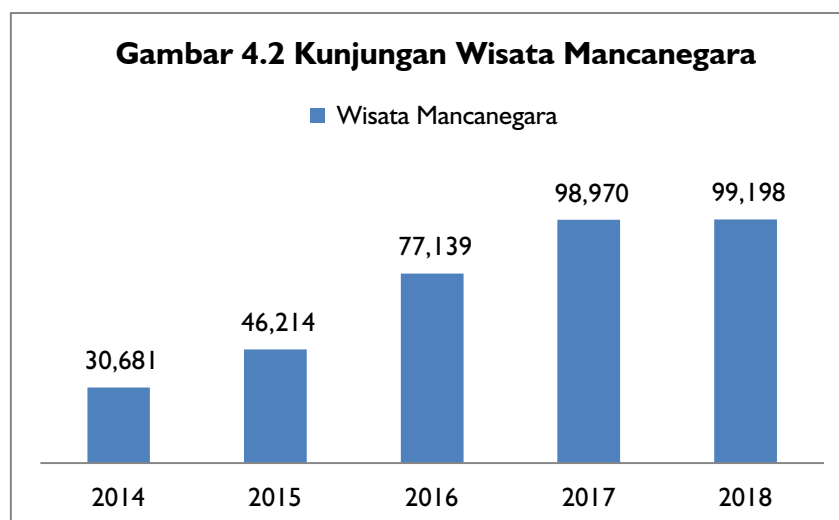
Obyek Wisata	Data pengunjung				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sekabupaten Banyuwangi					
• Wisnus	1.464.948	1.926.179	4.022.449	4.832.999	4.939.934
• Wisman	30.681	46.214	77.139	98.970	99.198
TOTAL	1.495.629	1.972.393	4.099.588	4.931.969	5.039.132

Sumber: Dinas Pariwisata, 2019.





Pada Gambar 1. memperlihatkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada Tahun 2014 sampai dengan 2018 secara kuantitatif mengalami peningkatan. Dengan pertumbuhan kunjungan tertinggi yaitu pada Tahun 2016 sebesar 52,11% dan terendah pada Tahun 2018 sebesar 2,16%.



Pada Gambar 2. memperlihatkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Tahun 2014 sampai dengan 2018 secara kuantitatif mengalami peningkatan. Dengan pertumbuhan kunjungan tertinggi yaitu pada Tahun 2016 sebesar 40,09% dan terendah pada Tahun 2018 sebesar 0,23%.

Strategi Pengembangan Wisata *Halal Friendly Tourism*

Strategi pengembangan wisata halal di Kabupaten Banyuwangi tidak lepas dari strategi pengembangan destinasi wisata yang telah diatur sesuai dengan Perda Rencana Induk



Pengembangan Kepariwisata Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 9, Strategi pembangunan pariwisata kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Banyuwangi terutama yang bergerak di bidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan pendapatan asli daerah;
- c. Menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Banyuwangi yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara temurun dipraktekkan dan dipelihara;
- d. Meningkatkan kualitas produk, sumberdaya pariwisata dan lingkungan secara intergral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
- e. Menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah pariwisata alam dan pariwisata budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia;
- f. Menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antar manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata

Dalam meraih kesuksesan pada Bidang Pariwisata Pemkab Banyuwangi menjalankan empat strategi kunci pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan yang diharapkan dengan kunjungan wisatawan tersebut maka akan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat Banyuwangi. Adapun strategi kunci dalam meraih kesuksesan pariwisata diantara adalah:

Pertama, menjadikan daerah sebagai "produk" yang mesti dipasarkan potensinya. "Birokrasi tidak hanya menjadi pelayan publik dalam keseharian, tapi juga bersama-sama pemangku kepentingan yang lain ikut mempromosikan wisata,"

Kedua, memilih strategi pemasaran yang tepat. Banyuwangi menawarkan petualangan dan pengalaman yang berbeda dengan daerah lain. Petualangan untuk wisata alam, sedangkan pengalaman adalah untuk wisata budaya dan wisata kegiatan lewat Banyuwangi Festival. Ada tiga segmentasi wisatawan yang dibidik, yaitu kaum perempuan, anak muda, dan pengguna internet (netizen). Tiga segmen konsumen itu punya pasar yang sangat besar. Jumlah perempuan di Indonesia ada 120 juta jiwa. Jumlah anak muda (16-30 tahun) hingga 62 juta jiwa. Pengguna internet 82 juta. Ketiga segmen pasar tersebut saling beririsan. Namun, ketiganya tetap memerlukan pendekatan pemasaran yang spesifik. "Karena itu, dalam Banyuwangi Festival setiap tahun ada acara yang sesuai segmentasi wisatawan. Ada festival musik jazz, batik, olahraga, dan sebagainya, yang mendekati masing-masing segmen secara spesifik,"

Ketiga, inovasi berkelanjutan. Inovasi juga dilakukan dengan pemasaran menggunakan aplikasi di "smartphone" atau telepon pintar. Keempat, pengelolaan pariwisata kegiatan lewat Banyuwangi Festival yang memperkenalkan potensi Banyuwangi. Festival digelar sejak 2012. Ini ajang festival berbasis wisata alam, budaya,



dan olahraga yang berlangsung setahun penuh. Dalam setahun ada sekitar 35 kegiatan wisata,"

Dalam pemikiran Al-Quran pemerintah dengan sendirinya tidak memiliki nilai instrinsik, tapi kekuasaan harus ditujukan untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan dan mengatur masyarakat. Mengimplementasikan dengan mantap keputusan, program dan kebijakan serta tidak menunda atau lemah dalam melaksanakan undang-undang. Allah SWT berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali- Imran :159)

Tafsir ayat diatas adalah Nabi Muhammad s.a.w. berbudi pekerti yang halus, berhati lunak lembut dan penyayang kepada umatnya. Oleh sebab itu, berduyun-duyun manusia masuk agama islam yang dibawanya. Ia tidak lupa bermusyawarah dengan mereka tentang yang bersangkutan paut dengan urusan negeri, seperti peperangan dan sebagainya. Setelah Nabi bermusyawarah dengan mereka dan telah sempurna alat perkakasnya, barulah ia mengerjakan pekerjaan itu sambil menyerahkan diri kepada allah. Yang dimaksud dengan peperangan pada ayat ini adalah segala urusan duniawi seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Dari penjelasan ayat diatas kita dapat ketahui jika kita telah membuat suatu kebijakan yang telah dibentuk secara musyawarah, dan telah mempersiapkan segala perlengkapan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Maka kita harus berusaha untuk melaksanakan kebijakan tersebut sambil menyerahkan diri kepada allah. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang bertawakkal.

Seharusnya sebuah kebijakan yang telah dibentuk harus dilaksanakan bukan hanya sekedar dibentuk saja. Karena kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Berikut firman Allah swt , QS. An- Nisaa' (4) ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَبْسُطُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi



pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An- Nisaa’ (4) ayat 58).

Tafsir ayat diatas menurut Prof. Dr. H. Mahmud Yunus dalam buku Tafsir Qur’an Karim adalah Allah menyuruh kamu supaya membayarkan amanah kepada 39 yang empunya, yang dimaksud amanah yaitu kepercayaan pada seseorang untuk diberikan kepada yang berhak mengambilnya. Seperti petaruh barang wajib diberikan kepada yang empunya. Amanah itu banyak macamnya, beberapa diantaranya seperti amanah ditangan kepala pemerintah supaya mengangkat pegawai yang ahli bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan, kemudian amanah ditangan pegawai negeri seperti tugas-tugas yang telah ditetapkan untuk dikerjakannya, melaksanakan kebijakan yang telah dibentuk maksudnya kebijakan yang telah dibuat harus dilaksanakan dengan baik, serta supaya menunaikan kewajiban masing-masing yang telah diberikan kepada pelaksana kebijakan. Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa Islam menghendaki agar kebijakan yang sudah dibuat dilaksanakan dengan baik, karena kebijakan tersebut merupakan suatu amanah yang dibuat pemimpin dan harus dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat tersebut.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan kebijakan dalam pengembangan wisata halal yang ramah di Banyuwangi harus dilaksanakan sesuai dengan etika dan peraturan yang telah ditetapkan di destinasi wisata tersebut yang memberikan ciri khas dengan destinasi wisata yang lainnya. Pemerintah sendiri dalam pembentukan detinasi wisata halal ini tidak lain untuk menangkap peluang pasar bukan untuk ‘mengarabisasikan’ wisata yang ada di pantai syariah tersebut, seperti *image* yang berkembang dibeberapa media.

Simpulan

1. Jumlah pengunjung wisatawan baik nusantara dan mancanegara di Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara tertinggi yaitu pada Tahun 2016 sebesar 52,11% dan terendah pada Tahun 2018 sebesar 2,16%, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara tertinggi yaitu pada Tahun 2016 sebesar 40,09% dan terendah pada Tahun 2018 sebesar 0,23%;
2. Strategi kebijakan dalam pengembangan wisata halal di Kabupaten Banyuwangi adalah berdasarkan segmen pasar saja bukan membatasi pengunjung yang mengkhususkan untuk area perempuan saja namun lebih menekankan bahwa perlunya inovasi-inovasi yang dapat mengena pada segmen pasar. Sehingga ketertarikan pengunjung dengan konsep yang ditawarkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke destinasi wisata di Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin.2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- AG, Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta Pustaka Pelajar.



- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka. BPS Kabupaten Banyuwangi
- Edgell, Sr., et.al. 2008. *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow* Amsterdam: Elsevier.
- Fanani, A. 2019. Banyuwangi Sudah Dua Tahun Terapkan Wisata Halal. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4446543/banyuwangi-sudah-2-tahun-terapkan-wisata-halal>. Diakses pada 30 Agustus 2019.
- Islamy, M. Irfan. (1997). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kompas.com. 2016. Empat Strategi Banyuwangi Raih Penghargaan Pariwisata PBB. <https://travel.kompas.com/read/2016/01/22/104123127/Empat.Strategi.Banyuwangi.Raih.Penghargaan.Pariwisata.PBB>. Diakses pada 30 Agustus 2019.
- Kompas.com. 2018. Banyuwangi Raih Penghargaan Kota Bersih Tingkat Asean. <https://travel.kompas.com/read/2018/01/28/140000127/banyuwangi-raih-penghargaan-kota-bersih-di-tingkat-asean>. Diakses pada 30 Agustus 2019.
- Nawawi, Hadari, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Perda Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nomor 13 Tahun 2012.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.

